

Kode>Nama Rumpun Ilmu : 561/Ekonomi Pembangunan
Bidang Fokus : Bidang X

USULAN PENELITIAN DOSEN



ANALISIS PENENTUAN LOKASI OPTIMAL PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN BARU UNTUK MENGATASI KETIMPANGAN WILAYAH DI PROVINSI JAMBI

TIM PENGUSUL

Ketua

Anggota

Dibiayai Oleh :

Dipa Universitas Muhammadiyah Jambi Tahun Anggaran 2022/2023

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAMBI
2023**

DAFTAR ISI

Contents

DAFTAR ISI	1
RINGKASAN.....	Error! Bookmark not defined.
BAB I. PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Perumusan Masalah.....	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	7
2.2 Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi	11
2.3 Teori Pusat Pertumbuhan.....	12
2.4 Pusat Pengembangan Ekonomi	14
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN.....	17
3.1 Metode Penelitian.....	17
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	17
3.3 Metode Analisis Data	17
BAB IV. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN	21
4.1 Anggaran Biaya.....	21
4.2 Jadwal Penelitian	21
DAFTAR PUSTAKA	22

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desentralisasi diartikan sebagai penyerahan kewenangan pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan (Undang-Undang nomor 32 tahun 2004), sehingga pemerintah kabupaten/kota diharapkan mampu mandiri di dalam penyelenggaraan pemerintahan, menentukan kebijakan pembangunan serta pendanaan. Kondisi ini akan mampu meningkatkan kemampuan dalam menggali dan mengelola sumber-sumber potensi yang dimiliki daerah, sehingga ketergantungan pada pemerintah pusat diusahakan seminimal mungkin. Kunci keberhasilan sistem desentralisasi melalui otonomi daerah dimana kebijakan pembangunan daerah ditekankan pada kekhasan karakteristik daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal. Pembangunan ekonomi daerah juga harus mampu menumbuhkan semangat untuk memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi melalui pemberdayaan potensi ekonomi lokal dan memanfaatkan peluang yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang dilakukan oleh masing-masing daerah apabila dibiarkan begitu saja akan menyebabkan terjadinya kesenjangan kemakmuran antar daerah maupun antar kawasan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan letak

geografis, kondisi, situasi alamiah dan sebagainya, yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Perbedaan perbedaan tersebut menyebabkan daerah yang memiliki potensi melimpah semakin kaya, sedangkan daerah yang memiliki potensi terbatas menjadi semakin miskin, sehingga perlunya cara untuk memperkecil tingkat ketimpangan daerah. Kondisi yang semacam itu dialami oleh Provinsi Jambi yaitu terjadinya ketimpangan antar kabupaten/kota di Provinsi Jambi, dan ketimpangan itu dapat dilihat melalui Produk Domestik Bruto (PDRB) suatu daerah. PDRB Provinsi Jambi dapat terlihat di tabel 1

Tabel 1 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010
Kabupaten /Kota di Propinsi Jambi Tahun 2016- 2021 (milyar rupiah)

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	Total
Kerinci	6.326,54	6.570,81	6.844,24	19.741,59
Merangin	9.787,46	9.869,18	10.371,68	30.028,32
Sarolangun	10.717,75	10.690,79	11.397,73	32.806,27
Batang Hari	11.713,38	11.667,61	12.221,19	35.602,18
Muaro Jambi	16.126,72	16.186,86	16.847,01	49.160,59
Tanjab Timur	17.967,59	17.262,51	17.284,93	52.515,03
Tanjab Barat	30.744,99	30.559,42	30.976,20	92.280,61
Tebo	10.160,98	10.158,89	10.597,49	30.917,36
Bungo	12.549,93	12.494,42	13.133,52	25.683,45
Kota Jambi	19.550,81	18.775,82	19.515,49	57.842,12
Sungai Penuh	4.607,81	4.600,23	4.768,84	13.976,88

Sumber : BPS Provinsi Jambi

Berdasarkan tabel 1 di atas terlihat bahwa selama 3 tahun terakhir, PDRB tertinggi diraih oleh kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu sebesar total Rp 92,280,61 milyar sementara PDRB terendah terjadi di kabupaten sungai penuh dengan total sebesar Rp 13.976,88milyar. Sementara jika dilihat lebih lanjut pada daerah tetangga para penghasil PDRB terbesar dan terkecil yaitu kabupaten

Tanjung Jabung Timur yaitu total sebesar Rp 52.515,03milyar, hampir setengah dari PDRB kabupaten Tanjung Kabung Barat selama 3 tahun. Dan jika dilihat urutan penyumbang PDRB terbesar, nomor 3 setelah kota Jambi. Selanjutnya untuk kabupaten kerinci, PDRB selama 3 tahun terakhir yaitu sebesar Rp 19.741,49milyar dan jika dilihat urutan penyumbang terkecil terhadap PDRB Provinsi Jambi menempati urutan ke 2 setelah Sungai Penuh. Sehingga dapat dikatakan bahwa rata-rata PDRB yang ada di Propinsi Jambi tidak bisa mewakili kondisi riil yang ada di lapangan, keadaan itu juga menjadi perhatian yang khusus dari pemerintah Propinsi Jambi dan pihak-pihak yang terkait untuk mencari solusi yang tepat.

Salah satu kebijakan pemerintah untuk mempersempit kesenjangan antardaerah adalah diterapkannya kebijakan pembangunan daerah melalui konsep kawasan andalan, yang berdasarkan potensi yang dimiliki daerah. Melalui kebijakan tersebut diharapkan dapat terjadi keseimbangan tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita antarwilayah, sehingga dapat menutup atau minimal mempersempit gap antara perkembangan ekonomi daerah.

1.2 Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. bagaimana posisi struktur perekonomian masing-masing kabupaten/kota di Propinsi Jambi?
2. Sektor-sektor ekonomi unggulan apa saja yang berpotensi untuk dikembangkan di masing-masing kabupaten/kota di Propinsi Jambi?

3. Bagaimana interaksi ekonomi di masing-masing kabupaten/kota Di Propinsi Jambi?

berdasarkan 3 rumusan masalah di atas, akan digunakan untuk menentukan kabupaten/kota mana yang berpotensi sebagai Pusat Pertumbuhan serta strategi pengembangan dari kabupaten/kota terpilih.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Bruto (PDB) atau dalam bahasa Inggris disebut Gross Domestic Product, merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi dan kinerja pembangunan, di suatu negara dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Sedangkan untuk mengukur kondisi ekonomi suatu daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota, digunakan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto/Gross Domestic Regional Product) PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar, sebagai contoh perhitungan PDB dan PDRB di Indonesia menggunakan tahun dasarnya yaitu tahun 2010.

Penentuan PDRB atas harga konstan, biasanya diperlukan untuk mengeluarkan pengaruh inflasi. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. PDRB juga dapat digunakan untuk

mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB (perubahan indeks implisit). dimana Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan. Perhitungan PDB maupun PDRB secara konseptual menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu: pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan.

1. Pendekatan Produksi: Perhitungan PDRB dengan pendekatan produksi merupakan adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). PDRB menurut lapangan usaha dikelompokkan dalam 9 sektor ekonomi sesuai dengan International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) 1) Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan, meliputi: a. Subsektor Tanaman bahan makanan b. Subsektor Tanaman perkebunan c. Subsektor Peternakan d. Subsektor Kehutanan e. Subsektor Perikanan. 2) Sektor Pertambangan dan Penggalian, meliputi: a. Subsektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, b. Subsektor Pertambangan Bukan Migas c. Subsektor Penggalian. 3) Sektor Industri Pengolahan, meliputi: a. Subsektor Industri Migas - Pengilangan Minyak Bumi- Gas Alam Cair (LNG), b. Subsektor Industri Bukan Migas - Makanan, Minuman dan Tembakau - Tekstil, Barang dari Kulit dan Alas Kaki - Barang Kayu dan Produk Lainnya - Produk Kertas dan Percetakan - Produk Pupuk, Kimia dan Karet - Produk Semen dan Penggalian Bukan Logam, - Logam Dasar Besi dan Baja, - Peralatan, Mesin dan Perlengkapan Transportasi - Produk

Industri Pengolahan Lainnya, 4) Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih, meliputi, a. Subsektor Listrik, b. Subsektor Gas, c. Subsektor Air Bersih, 5) Sektor Konstruksi, mencakup konstruksi bangunan, jalan, jembatan dan sejenisnya. 6) Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, meliputi a. Subsektor Perdagangan Besar dan Eceran, b. Subsektor Hotel, c. Subsektor Restoran 7) Sektor Pengangkutan dan Komunikasi. meliputi; Subsektor Pengangkutan Angkutan Rel- Angkutan Jalan Raya - Angkutan Laut - Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan - Angkutan Udara - Jasa Penunjang Angkutan b. Subsektor Komunikasi 8) Sektor Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan, meliputi: a. Subsektor Bank b. Subsektor Lembaga Keuangan Tanpa Bank, c. Subsektor Jasa Penunjang Keuangan d. Subsektor Real Estate, e. Subsektor Jasa Perusahaan. 9) Jasa-Jasa, meliputi: a. Subsektor Pemerintahan Umum, - Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan, - Jasa Pemerintahan Lainnya b. Subsektor Swasta - Jasa Sosial Kemasyarakatan - Jasa Hiburan dan Rekreasi - Jasa Perorangan dan Rumah Tangga

2. Pendekatan Pengeluaran: Perhitungan PDRB berdasarkan pendekatan pengeluaran/penggunaan dikelompokkan dalam 6 komponen yaitu: 1). Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, mencakup semua pengeluaran untuk konsumsi barang, dan jasa dikurangi dengan penjualan neto barang bekas dan sisa yang dilakukan rumah tangga selama setahun. 2). Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, mencakup pengeluaran untuk belanja pegawai, penyusutan dan belanja barang, baik pemerintah pusat dan

daerah, tidak termasuk penerimaan dari produksi barang dan jasa yang dihasilkan. Data yang dipakai adalah realisasi APBD. 3). Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto, mencakup pembuatan dan pembelian barang-barang modal baru dari dalam negeri dan barang modal bekas atau baru dari luar negeri. Metode yang dipakai adalah pendekatan arus barang. 4). Perubahan Inventori. Perubahan stok dihitung dari PDRB hasil penjumlahan nilai tambah bruto sektoral dikurangi komponen permintaan akhir lainnya. 5). Ekspor Barang dan Jasa. Ekspor barang dinilai menurut harga free on board (fob) 6). Impor Barang dan Jasa. Impor barang dinilai menurut cost insurance freight (cif).

3. Pendekatan Pendapatan: Perhitungan PDRB dengan pendekatan pendapatan merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung netto (pajak tak langsung dikurangi subsidi) Produk Nasional Bruto (PNB) adalah PDB ditambah dengan pendapatan netto dari luar negeri. Pendapatan netto luar negeri adalah pendapatan atas faktor produksi (tenaga kerja dan modal) milik penduduk Indonesia yang diterima dari luar negeri dikurangi dengan pendapatan yang sama milik penduduk asing yang diperoleh di Indonesia. Pendapatan Nasional adalah PNB dikurangi

dengan pajak tidak langsung (neto) dan penyusutan. Pajak tidak langsung netto adalah pajak tidak langsung dikurangi dengan subsidi pemerintah. Indeks implisit PDB merupakan rasio antara PDB harga Berlaku dengan PDB harga konstan. Deflator PDB adalah laju pertumbuhan indeks implisit PDB. Ekspor barang dan impor merupakan kegiatan transaksi barang dan jasa antara penduduk Indonesia dengan penduduk negara lain.

2.2 Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi

Karl seidman mengartikan pembangunan ekonomi adalah sebuah proses menciptakan serta memanfaatkan aset fisik, keuangan, manusia, erta sosial untuk dapat menghasilkan kesejahteraan ekonomi serta kualitas hidup yang lebih baik juga dibagi lagi secara luas untuk para suatu komunitas maupun wilayah. Dengan demikian, pembangunan ekonomi harus dilihat sebagai proses multidimensional yang meliputi perubahan pada berbagai aspek, termasuk di dalamnya infrastruktur sosial, sikap masyarakat, serta institusi nasional tanpa mengesampingkan tujuan awal yaitu pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan serta perluasan kesempatan kerja. (Suryana, 2000). Berbeda dengan pembangunan ekonomi yang mencakup arti luas, pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai suatu proses yang mengakibatkan perndapatan per kapita meningkat dalam jangka panjang tanpa memperhitungkan pertambahan penduduk, perubahan struktur ekonomi maupun modernisasi. Pembangunan Ekonomi Daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdayasumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara

sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan ekonomi (pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut) (Lincoln Arsyad, 1999). Masalah pokok dalam pembangunan daerah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya fisik secara lokal. Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi

2.3 Teori Pusat Pertumbuhan

Analisis mengenai pusat pertumbuhan merupakan suatu analisis yang cukup populer dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah karena bisa mengsinkronkan aspek pertumbuhan dan pemerataan pembangunan antar wilayah yang kadangkala bersebrangan antara satu dengan lainnya. Dengan konsep ini diharapkan sasaran pembangunan lebih mudah tercapai. Perroux (1955) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi cenderung terkonsentrasi pada daerah tertentu yang didorong oleh adanya keuntungan aglomerasi yang timbul karena adanya konsentrasi kegiatan ekonomi tersebut.

Munculnya beberapa konsentrasi kegiatan ekonomi ini selanjutnya mendorong pula peningkatan efisiensi kegiatan ekonomi yang berdampak positif bagi pembangunan ekonomi nasional/regional (safrizal, 2008) Selanjutnya Hirschman (1958) mengatakan bahwa ada daerah tertentu yang tumbuh dengan cepat (growing point) dan adapula yang bertumbuh sangat lambat (lagging

region). Hal ini terjadi karena dalam proses pembangunan terdapat efek rembesan (trickling down effect) dan efek konsentrasi (polarization effect) yang berbeda antara suatu daerah dengan daerah lainnya. Karenanya untuk mencapai tingkat pendapatan yang tinggi, terdapat keharusan untuk membangun sebuah atau beberapa buah pusat kekuatan ekonomi dalam wilayah suatu negara atau yang disebut sebagai pusat-pusat pertumbuhan (growth pole) (adisasmita, 2005) Pusat Pertumbuhan dapat diartikan dengan dua cara, yaitu secara fungsional dan secara geografis. Secara fungsional Pusat Pertumbuhan adalah suatu konsentrasi kelompok usaha atau cabang industry yang karena sifat hubungannya memiliki unsureunsur kedinamisan sehingga mampu menstimulasi kehidupan ekonomi baik kedalam maupun keluar. Sedangkan secara geografis pusat pertumbuhan merupakan suatu lokasi yang banyak memiliki fasilitas dan kemudahan sehingga menjadi pusat daya tarik (pole of attraction) yang menyebabkan berbagai macam usaha tertarik untuk berlokasi disitu dan masyarakat senang datang memanfaatkan fasilitas yang ada dikota tersebut (tarigan, 2004) Sedangkan Richardson (1977) mendefinisikan Pusat Pertumbuhan sebagai berikut :” A growth pole was defined as a set of industries capable of generating dynamic growth in the ekonomi and strongly interrelated to each other via input-output linkages around a leading industry(propulsive industry) (sjafrizal, 2008).

Dari pengertian diatas terlihat bahwa ada 4 ciri utama dari suatu pusat pertumbuhan,yaitu antara lain : (1) terdapat sekelompok aktivitas ekonomi yang terkonsentrasi pada suatu lokasi; (2) konsentrasi tersebut dapat mendorong kegiatan ekonomi yang dinamis dalam perekonomian; (3) terdapaat keterkaitan

input dan output antara sesama kegiatan ekonomi pada pusat pertumbuhan tersebut, dan (4) terdapat sebuah industri induk yang mendorong pengembangan kegiatan ekonomi dalam pusat pertumbuhan tersebut.

Pertumbuhan ekonomi tidak dapat terjadi secara serentak pada semua tempat dan semua sektor perekonomian, tetapi hanya pada titik-titik tertentu dan pada sektor-sektor tertentu pula. Sebaiknya investasi diprioritaskan pada sektor-sektor utama yang berpotensi dan dapat meningkatkan pendapatan wilayah dalam jangka waktu relatif singkat (Glasson, 1990).

Pernyataan diatas dimaksudkan bahwa wilayah yang memiliki potensi berkembang lebih besar akan berkembang lebih pesat, kemudian pengembangan wilayah tersebut akan merangsang wilayah sekitarnya. Bagi sector yang memiliki potensi berkembang lebih besar cenderung dikembangkan lebih awal yang kemudian diikuti oleh perkembangan sector lain yang kurang potensial. Karena sector ini diharapkan dapat tumbuh dan berkembang pesat yang akan merangsang sektor-sektor lain yang terkait untuk berkembang mengimbangi perkembangan sektor potensial tersebut. Hal inilah yang memungkinkan pengembangan sektor potensial dilakukan sebagai langkah awal dalam pengembangan perekonomian dan pembangunan pusat pertumbuhan (growth pole) untuk pengembangan wilayah secara keseluruhan.

2.4 Pusat Pengembangan Ekonomi

Higgins (1995) dalam safrizal (2008) menyatakan bahwa : “the growth poles is a set of economic activities that has capacity to introduce the growth of another set. The poles of development is a set that has the capacity to engender a

dialectic of economic and social structure whose effect is to increase the complexity of the whole and to expand its multidimensional return” Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa pusat pertumbuhan merupakan sekumpulan aktivitas ekonomi yang dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi lainnya secara positif. Sedangkan Pusat pembangunan adalah sekumpulan aktivitas ekonomi yang memiliki kemampuan untuk membangkitkan struktur ekonomi yang mendasar dan dapat mendorong proses pembangunan daerah secara multidimensional. Karena pembangunan disini lebih berorientasi pada kegiatan ekonomi, maka pusat pembangunan dapat diistilahkan pula sebagai pusat pengembangan ekonomi (economic development poles).

Sejalan dengan pengertian diatas, Arsyad (2011;108) mengartikan pengembangan ekonomi daerah sebagai suatu proses dimana pemerintah daerah bersama masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah dan sector swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Suatu investasi pada pusat pengembangan ekonomi akan mempengaruhi pertumbuhan kota pada daerah tersebut dalam bentuk peningkatan investasi, lapangan kerja, pendapatan dan kemajuan teknologi yang kesemuanya merupakan unsur kemakmuran.

Kemakmuran secara umum dapat diketahui dari tingkat pendapatan perkapita, karenanya pusat pengembangan ekonomi ini dapat diidentifikasi dalam bentuk elastisitas kemakmuran (W_r) dari daerah dimana pusat tersebut berada. Dalam kaitan dengan hal ini, menurut safrizal (2008.132-133), jika

diumpamakan wilayah R terdiri dari pusat perkotaan, u , dan daerah belakangnya, r , maka struktur suatu wilayah dapat digambarkan sebagai berikut :

$$R = u + r$$

Dari sini dapat dikatakan bahwa u akan menjadi pusat pengembangan bilamana elastisitas investasi pada pusat tersebut terhadap kemakmuran adalah positif, atau,

$$\begin{aligned} W_r &= (\Delta W_r / W_r) / (\Delta I_u / I_u) \\ &= (I_u / W_r)(\Delta W_r / I_u) > 0 \end{aligned}$$

Ini berarti bahwa investasi pada pusat pengembangan akan mendorong pertumbuhan ekonomi pada wilayah bersangkutan. Bila hasil perhitungan elastisitas pada persamaan diatas ternyata >1 , yang berarti bahwa bilamana investasi sebesar 1% pada pusat tersebut dapat menghasilkan pendapatan lebih besar dari 1%, maka daerah tersebut dapat dikatakan sebagai pusat pengembangan ekonomi yang dominan. Akan tetapi bila elastisitas kemakmuran tersebut bergerak antara 0 sampai 1, maka pusat tersebut dikatakan sebagai pusat pengembangan yang “sub dominant”.

Sejalan dengan hal diatas, klassen (1973) mengatakan bahwa, efisiensi ekonomi nasional akan turun jika sumberdaya capital dalam jumlah yang banyak ditanamkan pada daerah-daerah yang bermasalah, yaitu daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi atau pendapatan perkapita lebih rendah dari tingkat nasional. Setelah membagi daerah dalam 4 klasifikasi, klassen menyarankan pemerintah untuk lebih memprioritaskan investasi pada daerah inti (tipologi 1) yaitu daerah yang memiliki pertumbuhan dan pendapatan perkapita lebih tinggi dari pendapatan nasional (arsyad.2011;148).

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, sedangkan analisis kuantitatif adalah metode analisis yang melakukan perhitungan terhadap data-data yang bersifat pembuktian dari masalah. Sehingga metode deskriptif kuantitatif adalah metode penelitian yang memamparkan atau menjelaskan data melalui angka-angka.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk seri waktu (time series) yang bersumber dari publikasi BPS dan lembaga terkait lainnya, serta literatur pendukung selama periode tahun 2010–202 di Provinsi Jambi.

3.3 Metode Analisis Data

Berdasarkan rumusan masalah yang ditetaokan sebelumnya, maka metode analisis datanya sebagai berikut :

1. Untuk menjawab pertanyaan pertama maka digunakan Analisis Tipologi Klassen Alat analisis tipologi daerah digunakan untuk mengetahui gambaran mengenai pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Tipologi daerah pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita daerah. Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan

ekonomi sebagai sumbu vertikal dan rata-rata pendapatan per kapita sebagai sumbu horizontal, daerah yang diamati dapat dibagi menjadi empat klasifikasi, yaitu: daerah cepat maju dan cepat tumbuh (high growth and high income), daerah maju tapi tertekan (high income but low growth), daerah berkembang cepat (high growth but low income) dan daerah relatif tertinggal (low growth and low income) (Sjafrizal, 1997:27-38 dalam Kuncoro, 2004:223).

2. Untuk menjawab pertanyaan kedua maka digunakan Analisis Location Quotient (LQ). Alat analisis Location Quotient (LQ) membandingkan besarnya peranan sektor di suatu daerah (kabupaten dan kota di Propinsi Jambi) terhadap besarnya peranan sektor tersebut di tingkat daerah di atasnya (Propinsi Jambi). Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi potensi internal yang dimiliki daerah tersebut yaitu sektor basis dan sektor non basis. Rumus LQ dapat ditulis sebagai berikut:

$$LQ = \frac{Vi/Vt}{Yi/Yt}$$

Dimana :

Li = jumlah tenaga kerja sektor i pada tingkat wilayah yang lebih rendah

Lt = total tenaga kerja pada tingkat wilayah yang lebih rendah

Ni = jumlah tenaga kerjan sektor i pada tingkat wilayah yang lebih diatas

Nt = total tenaga kerja pada tingkat wilayah yang lebih diatas

Vi = nilai PDRB sektor i pada tingkat wilayah yang lebih rendah

Vt = total PDRB pada tingkat wilayah yang lebih rendah

Yi = nilai PDRB sektor i pada tingkat wilayah yang lebih atas

Analisis Model Rasio Pertumbuhan. Analisis Model Rasio

Pertumbuhan merupakan alat analisis alternatif yang dapat digunakan dalam

perencanaan wilayah dan kota yang diperoleh memodifikasi model analisis Shift – Share. Pendekatan MRP dibagi menjadi dua, yaitu : Rasio pertumbuhan wilayah referensi (RPr) Dalam hal ini RPr membandingkan antara laju pertumbuhan kegiatan i wilayah referensi (Propinsi Jambi) dengan laju pertumbuhan total kegiatan (PDRB Kabupaten/Kota di Propinsi Jambi). Rumus RPr yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

$$RPr = \frac{\Delta EiR / EiR(t)}{\Delta ER / ER(t)}$$

Keterangan :

- RPr = Rasio pertumbuhan wilayah referensi (Propinsi Jambi)
- ΔEiR = Perubahan pendapatan kegiatan i di kabupaten/kota di Propinsi Jambi
- EiR = Pendapatan kegiatan i di kabupaten/kota di Propinsi Jambi
- ΔER = Perubahan PDRB di kabupaten/kota di Propinsi Jambi
- ER = PDRB di kabupaten/kota di Propinsi Jambi

Rasio Pertumbuhan Wilayah Studi Dalam hal ini RPs membandingkan antara laju pertumbuhan kegiatan i di wilayah studi (kabupaten/kota di Propinsi Jambi) dengan laju pertumbuhan sektor di wilayah referensi (Propinsi Jambi). Rumus RPs yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

$$RPs = \frac{\Delta Eij / Eij(t)}{\Delta EiR / EiR(t)}$$

Keterangan :

- RPs = Rasio pertumbuhan wilayah studi (kabupaten/kota di Propinsi Jambi)
- ΔEij = Perubahan pendapatan kegiatan i di kabupaten/kota pada periode t
- Eij = Pendapatan kegiatan i di kabupaten/kota
- ΔEiR = Perubahan pendapatan kegiatan i di wilayah referensi (Propinsi Jambi)

E_{iR} = Pendapatan kegiatan i di wilayah referensi (Propinsi Jambi)

3. Untuk menjawab pertanyaan ketiga mengenai bagaimana interaksi ekonomi antar daerah maka menggunakan rumus sebagai berikut :

$$I_{12} = a(W_1 P_1)^b (W_2 P_2)^c / J_{12}$$

Keterangan :

I_{12} = interaksi dalam wilayah 1 dan 2

W_1 = PDRB perkapita wilayah 1 (rupiah)

W_2 = PDRB perkapita wilayah 2 (rupiah)

P_1 = jumlah penduduk wilayah 1

P_2 = jumlah penduduk wilayah 2

J_{12} = jarak antar wilayah 1 dan 2 (meter)

a = konstanta yang nilainya 1

b = konstanta yang nilainya 2

BAB IV. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

4.1 Anggaran Biaya

No	Jenis Pengeluaran	Biaya yang diusulkan (Rp)
1	Transportasi	250.000,-
2	Pembelian bahan habis pakai	400.000,-
3	Konsumsi	250.000,-
4	Penerbitan Jurnal	600.000,-
Jumlah		1.500.000,-

4.2 Jadwal Penelitian

[illegible]

DAFTAR PUSTAKA

- Apriansyah, Muhammad Adjie, Anna Yulianita, and Imelda Imelda. *Analisis Pusat Pertumbuhan Di Kawasan Seberang Ulu Kota Palembang*. Diss. Sriwijaya University, 2018.
- Emalia, Zulfa, and Isti Farida. "Identifikasi Pusat Pertumbuhan Dan Interaksi Spasial Di Provinsi Lampung." *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan* 19.1 (2018): 61-74.
- Fadrullah, M. (2022). *Analisis Penentuan Pusat-Pusat Pertumbuhan Di Kecamatan Pangkaln Kuras Kabupaten Pelalawan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Febrianto, F. H., & Santoso, E. B. (2022). Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan Di Wilayah Madiun Raya Untuk Mengurangi Tingkat Ketimpangan Pendapatan Wilayah. *Jurnal Penataan Ruang*, 17(1), 41-47.
- Iqbal, Muhammad. *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pembangunan Wilayah di Provinsi Jambi*. Diss. IPB University.
- Jati, D. H. (2016). KAJIAN PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAHDI KABUPATEN BOYOLALI. *Geo Educasia*, 1(5).
- Karmila, K., & Risma, O. R. (2022). Identifikasi Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Dalam Pengembangan Wilayah Kabupaten Aceh Selatan. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(3), 1739-1745.
- Nainggolan, Pandapotan. "Analisis penentuan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di kabupaten simalungun." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* 1.12 (2013): 14770.
- Paramita, P. F. C., Amin, C., & MM, S. S. (2020). *Evaluasi Penentuan Pusat-Pusat Pertumbuhan dalam Pengembangan Wilayah di Kabupaten Wonogiri* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Pasaribu, E., Priyarsono, D. S., Siregar, H., & Rustiadi, E. (2014). Dampak Spillover Pusat-Pusat Pertumbuhan di Kalimantan. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 5(2), 225-238.
- Putra, D. A. W., Rusda, D., & Aziz, A. (2020). Analisis Penentuan Pusat-Pusat Pertumbuhan (Growth Pole) dan Wilayah Belakang (Hinterland) Provinsi Kalimantan Tengah. *Ecoplan*, 3(2), 105-118.

- Rachmadani, Ananda Putri, Azwardi Azwardi, And Nazeli Adnan. *Pusat Pertumbuhan Dan Potensi Ekonomi Di Kabupaten Penulak Abab Lematang Ilir (Pali) Provinsi Sumatera Selatan*. Diss. Sriwijaya University, 2019.
- Rahayu, E. (2014). *Penentuan pusat-pusat pertumbuhan dalam pengembangan wilayah di kabupaten Gunungkidul* (Doctoral dissertation, Institut Teknologi Sepuluh Nopember).
- Rizki, D. A., Rustiadi, E., & Soma, S. (2017). Penentuan Pusat-pusat kegiatan baru sebagai Alternatif untuk mengurangi Kemacetan Kota Bogor. *Journal of Regional and Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan)*, 1(3), 287-297.
- Robingatun, R., Hayati, R., & Indrayati, A. (2014). Daya Saing Wilayah dan Sektor Unggulan Sebagai Penentu Pusat Pertumbuhan Baru Orde II Di Kabupaten Purworejo. *Geo-Image*, 3(1).
- Salmah, E., Sahri, S., & Astuti, E. (2020). Analisis Penentuan Pusat Pertumbuhan Baru di Kabupaten Lombok Barat. *Elastisitas-Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 62-71.
- Saputra, J. (2021). Kajian Penetapan Desa Pusat Pertumbuhan Dalam Pengembangan Wilayah Di Kecamatan Pangean Bagian Selatan. *Jurnal Perencanaan, Sains Dan Teknologi (Jupersatek)*, 4(1), 619-624.
- Siregar, S. D. S. (2019). Analisis Pengembangan Wilayah Melalui Pusat Pusat Pertumbuhan Baru di Wilayah Pesisir Kabupaten Deli Serdang.
- Sugiyono, Agus. "Pengembangan Industri Padat Energi Di DAS Mamberamo Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Di Kawasan Timur Indonesia." *Prosiding Teknologi, Ekonomi, Dan Otonomi Daerah, BPPT, Jakarta, Hal* (1999): 2-89.
- Umar, M. I. Z. B., Ramly, F., & Matitaputty, I. T. (2021). Analisis Penentuan Daerah Pusat Pertumbuhan/Pelayanan Di Wilayah Kepulauan Maluku. *JURNAL PERTANIAN KEPULAUAN*, 5(2), 1-10.
- Wahyuni, Resti Sri, Hamdi Nur, And Lasti Yossi. "Tipologi Kabupaten Di Provinsi Jambi Berdasarkan Kesejahteraan Masyarakat." *Abstract Of Undergraduate Research, Faculty Of Civil And Planning Engineering, Bung Hatta University* 1.1 (2018).